

**DAFTAR BACAAN**

**Buku**

- Abdurrachman, Hamidah, Nugraha, Rahmad Agung dan Majesty, Nayla. *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*. Deepublish, Jakarta, 2020.
- Amrani, Hanafi dan Ali, Mahrus. *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*. Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia, Malang, 2005.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Geary, Roger. *Understanding Criminal Law*. Cavendish Publishing Limited, Oregon, United States of America, 2002.
- Hartanto, Pura, Margo Hadi, Senjaya, Oci. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Deepublish Publisher, Sleman, 2020.
- Hasnati. *Sosiologi Hukum: Bekerjanya Hukum di Tengah Masyarakat*. Absolute Media, Yogyakarta, 2015.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006.
- Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara sebagai Instrumen Investasi di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018).
- Indonesia, Kementerian Keuangan Republik. *Buku Pintar Dana Desa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2017. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>.
- Kansil, C.S.T. dan Kansil, Christine S.T. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Manulang, Fernando M. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Buku Kompas, Jakarta, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet.12*. Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi kelima. Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum Cet.1*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Nain, Umar. *Pembangunan Desa dalam Perspektif Sosiohistoris*. Penerbit Garis Khatulistiwa, Makassar, 2019.
- P, Peter J. *The Dutch Criminal Justice System*. Wolf Legal Publisher, Nijmegen, 2008.

- Pemberantasan Korupsi, Komisi. *Memahami Untuk Membasmi (Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*. Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006.
- Ramiyanto. *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2019.
- Rasjidi, Lilis, dan Putra, I. B. Wyasa. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Saleh, Roeslan. *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
- Sari, Safitri Wikan Nawang. *Hukum Pidana Dasar*. Lakeisha, Klaten, 2020.
- Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sidharta. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*. Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010.
- Sjawie, Hasbullah F. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tipikor*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Soeriaatmadja, Arifin, et. al., *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara)*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2010.
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru, Bandung, 1983
- Sukiyat, H. *Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi*. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.
- Suryadi, Bambang. *Memahami Peraturan Pemerintah tentang Desa*. Cetakan Pertama, Sai Wawai, Bandar Lampung, 2016.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish Publisher, Sleman, 2018.
- Swantoro, Herri. *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*. Prenadamedia Group, Depok, 2017.
- Todaro, Michael P., dan. Smith, Stephen C *Pembangunan Ekonomi*, Edisi 9 Jilid 1. Penerbit Erlangga, Jakarta, 2006.
- Tohari, A. Ahsin. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. ELSAM, Jakarta, 2004.
- Triputra, Widodo. *Regulasi Desa*. Deepublish, Jakarta, 2019.
- Usfa, Fuad, dan Tongat. *Pengantar Hukum Pidana*. UMM Press, Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- Wrihatnolo, Randy R. dan Dwijowijoto, Riant Nugroho. *Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar dan Panduan*. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006.

### **Jurnal**

- Armono, Yudhi Widy. 'Korupsi Karena Penyalahgunaan Wewenang', *Jurnal Media Neliti*, h. 2, <https://media.neliti.com/media/publications/170347-ID-korupsi-karena-penyalahgunaan-wewenang.pdf>, dikunjungi pada tanggal 12 Oktober 2020.

- Chakim, M. Lutfi. 'Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, 2015.
- Christianto, Hwian. 'Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana', *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 3, 2011.
- Dhanaindrata, Andhika, Soponyono, Eko, Purwoto, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Jalur Alternatif Jalan Lingkar Kota Slawi Kabupaten Tegal (Studi Putusan Nomor: 157/ Pid. B/ 2009/ PN. Slw)'. *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2013.
- Hayati, Nur dan Reynaido, Andrea. 'Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Secara Tidak Sukarela Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2257 K/PID/ 2006)'. *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 7, No. 1, 2009,.
- Helmi, Muhammad. 'Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 1, 2020.
- Herdiana, Dian. 'Kecenderungan Perilaku Koruptif Kepala Desa dalam Pembangunan Desa'. *Jurnal Matra Pembaruan*, Vol. 1, 2019.
- Karmani, Herlyn S, Erny dan Yudianto, Otto. 'Pembentukan Klinik Desa merupakan Cegah Dini Tindak Pidana Korupsi Dana Desa', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Langkun, Tama S., *et. al.*, 'Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi'. *Policy Paper Indonesia Corruption Watch*, 2014.
- Mukhidin. 'Hukum Progresif sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 3, 2014.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Ke-1, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- Munawar, Kukun Abdul Syakur. 'Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Galuh Justisi*, Vol. 3, No. 2, 2015.
- Nugraha, Xavier, *et. al.*, 'Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan', *Lex Scientia*, Vol.3, No. 1, 2019..
- Pakaya, Jefri S. 'Pemberian Kewenangan Pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah'. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 1, 2016.
- Pearce, Dennis, Enid Campbell dan Don Harding, *Australian Law Schools: A Discipline Assessment for the Commonwealth Tertiary Education Commission*, Australian Government Publication Services, Canberra, 1987, h. 8-307.
- Rahman, Fathur. 'Korupsi di Tingkat Desa'. *Jurnal Governance*, Vol. 2, No. 1, 2011.
- Sahlan, Mohammad. 'Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23, No. 2, 2016.
- Sahetapy, J. E. 'Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional', *Pro Justitia, Majalah Hukum*, Tahun VII, Nomor 3, Juli 1989.

- Yulianah, Yuyun. 'Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa', *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. 1, No. 2, 2015.
- Zulgani. 'Re-Orientasi Strategi Pembangunan dalam Konteks Pencapaian Visi Misi Indonesia 2030'. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol. 1, No. 4, 2011.

### Penelitian

- Emerson Yuntho, *et.al.*, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, **Penelitian Indonesia Corruption Watch**, 2014.

### Media Internet

- Aini, Nur. "ICW: Dana Desa Paling Rawan Dikorupsi", 8 Februari 2019, <https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/19/02/08/pmlnvn382-icw-dana-desa-paling-rawan-dikorupsi>, dikunjungi pada tanggal 13 Oktober 2020.
- Faisol, Ahmad. "Korupsi Rp. 20 Juta, Kades Perempuan Ditahan", 26 November 2012, <https://regional.kompas.com/read/2012/11/26/1905067/Korupsi.Rp.20.Juta.Kades.Perempuan.Ditahan>, dikunjungi pada tanggal 10 Oktober 2020.
- House, Anti Corruption Clearing. "Kawal Dana Desa, Rakyat Sejahtera", <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/paper/kawal-dana-desa-rakyat-sejahtera>, dikunjungi pada tanggal 10 Oktober 2020.
- Indonesia, Hubungan Masyarakat Sekretariat Kabinet Republik. "Membangun Indonesia dari Pinggiran Desa", 24 Juni 2019, <https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/>, dikunjungi pada tanggal 10 Oktober 2020.
- Indonesia, Kementerian Keuangan Republik. "Akumulasi Penyaluran Dana Desa Hingga Tahun 2018 Tahap 2 Mencapai Rp149,31 T", 24 Juli 2018, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akumulasi-penyaluran-dana-desa-hingga-tahun-2018-tahap-2-mencapai-rp149-31-triliun/#:~:text=Kebijakan%20Dana%20Desa%2C%20terus%20meningkat,sebesar%2024%20Triliun%2C%E2%80%9D%20ujarnya.>, dikunjungi pada tanggal 10 Oktober 2020.
- Keuangan, Kementerian. "Dana Alokasi Khusus", <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/DAK.pdf>, dikunjungi pada tanggal 12 Oktober 2020
- Kusuma, Hendra. "'Desa Hantu' Bisa Sedot Dana Desa Hingga Rp 900 Juta", 9 November 2019, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4778146/desa-hantu-bisa-sedot-dana-desa-hingga-rp-900-juta>, dikunjungi pada tanggal 10 Oktober 2020.
- Lancok, Andi Firdhaus. "Pola Korupsi dan Pengawasan Dana Desa", 2018, <https://aceh.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Pola-Korupsi-dan-Pengawasan-Dana-Desa.pdf>, dikunjungi pada tanggal 12 Oktober 2020.
- Pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan dan. "Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa", 2015,

<http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeudesada.pdf>, dikunjungi pada tanggal 12 Oktober 2020.

Tempo, Koran. “Korupsi Dana Desa Gunungkidul Disidangkan”, 26 Oktober 2013, <https://koran.tempoco.com/read/berita-utama-jateng/325734/korupsi-dana-desa-gunungkidul-disidangkan?>, dikunjungi pada tanggal 10 Oktober 2020.